



**KECENDERUNGAN PEMILIH MUSLIM KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

INDAH GUSTARI

NIM: 15 103 00005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KECENDERUNGAN PEMILIH MUSLIM KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014)**

SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

INDAH GUSTARI
Nim : 15 103 00005

PEMBIMBING I

DRS. H. DAME SIREGAR, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

DR. MUHAMMAD ARSAD NASUTION, M.Ag
NIP.19730311 2001121 004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal. Skripsi
A.n. Indah Gustari

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi n. **Indah Gustari** yang berjudul: **Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidempuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

DR. Muhammad Arsad Nasution, M.A
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Indah Gustari
NIM. : 1510300005
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidempuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 November 2019
Pembuat pernyataan



Indah Gustari
NIM: 1510300005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Gustari
NIM. : 1510300005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidempuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 15 November 2019

Yang menyatakan,



Indah Gustari
NIM. 1510300005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: iaipad@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Indah Gustari

NIM : 1510300005

Judul Skripsi : Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidempuan

(Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP: 19630907 199103 1 001

Derminda Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Jumat/ 15 November 2019
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai	: 91,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,46
Predikat	: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: inshah@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : 41 /In.14/D/PP.00.9/01/2020

Judul Skripsi : **KECENDERUNGAN PEMILIH MUSLIM KOTA
PADANGSIDIMPUAN (STUDI PEMILU LEGISLATIF
TAHUN 2014)**

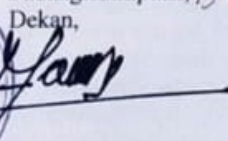
Ditulis Oleh : INDAH GUSTARI
NIM : 1510300005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 13 Januari 2020

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “***Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidimpuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)***”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidan penuh rasa syukur, penulis berterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A..pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Omri Pandiangan dan Ibunda tersayang Eva Yani Sinaga yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

8. Saudara-saudara saya, Nova Ariyanti Pandiangan, S.Pd, Janrivo Pandiangan yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertiga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Terima kasih kepada partner terbaik saya Abdul Rohman Rangkuti yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 1 angkatan 2015. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
11. Terimakasih kepada kantor KPU Padangsidempuan yang telah memberikan banyak bantuan data dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November
2019
Penulis,

Indah Gustari
NIM. 15 103 00005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau difthong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
و.....و	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dengar isata s
.....ى	<i>Kasrah</i> danya	ī	Idangaris di bawah
و.....و	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamar butah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmutajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: ProyekPengkajiandanPengembanganLektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Indah Gustari
Nim : 1510300005
Judul : “Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidimpuan
(Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)”
Tahun : 2019

Penelitian skripsi ini berjudul Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidimpuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan politik masyarakat muslim kota padangsidimpuan dalam memilih partai(Nasional/ Islam) pada pemilu Legislatif tahun 2014 dan apakah yang menjadi faktor sehingga masyarakat memilih dinatar kedua golongan partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014.

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspirasi politik masyarakat muslim kota padangsidimpuan dalam memilih partai(Nasional/ Islam) pada pemilu Legislatif tahun 2014 dan apakah yang menjadi alasan sehingga masyarakat memilih salah satu dinatar kedua golongan partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspirasi politik masyarakat muslim kota padangsidimpuan dalam memilih partai(Nasional/ Islam) pada pemilu Legislatif tahun 2014 dan apakah yang menjadi alasan sehingga masyarakat memilih salah satu dinatar kedua golongan partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan mengenai hasil pemilu legiskatif tahun 2014 dan data sekubder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dianggap kompeten dalam meberikan informasi yang berada diluar data KPU. Kota Padangsidimpuan .

Berdasrkan hasil penelitian ini diketahui bagaimana jawaban dari rumusan masalah tersebut, dalam pemilu legislaif tahun 2014 masyarakat muslim lebih cenderung memilih partai politik nasional, partai politik Islam memperoleh suara yang sabgat rendah dalam ajang pemilu tahun 2014 dikarenakan masyarakat merasa bahwa program-program partai poitik Islam tidak terealisasikan secara penuh pada masyarakat, selain itu masyarakat mengaku tidak terlalu mengenal partai politik Islam, partai politik Islam diamggap kurang dekat terhadap masyarakat, partai politik Islam juga diakui beberapa kalangan pelajr dan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak konsisten lagi terhadap visi-misi partainya bahkan menjadikan agama hanya sebagai jargon Partai yang tidak direalisasikan.

Kata Kunci: Kecenderungan Masyarakat, Pemilu legislatif.,Partai Politik Islam dan Partai Pilitik Nasional.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kecenderungan	11
B. Pengertian Masyarakat	12
C. Partai Politik Islam dan Partai Politik Nasional	17
D. Pemilu Menurut Para Ahli	26
E. Pengertian Legislatif	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kecenderungan Masyarakat Muslim Kota Padangsidimpuan dalam menyalurkan aspirasi politik	47
B. Hasil Penelitian	54
C. Analisis Penulis	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaringan bagi politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Dalam hal ini menunjukkan bahwa rakyat menentukan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan guna mengawasi jalannya dan terselenggaranya pemerintahan negara.

Adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik sah dan damai. Pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan dan dinyatakan mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.¹

Partisipasi politik adalah sebuah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi pelaksanaan serta pembuatan kebijakan umum dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat dalam pemilihan

¹Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Perindo Persada, 2015). hlm. 60.

umum. Dalam faktor sosilogis perilaku memilih dibahas mengenai hal-hal atau pertimbangan apa saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan caleg atau partai politik yang dipilihnya, yang ditinjau dari faktor sosiologis seperti pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan yang paling sering adalah agamanya.

Temuan survei pakar politik menunjukkan bahwa faktor agama yang berupa latar belakang agama caleg, dan latar belakang pendidikan yang berupa latar pendidikan caleg serta latar pendidikan pemilih sangat mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif.² Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang disaat yang sama corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang akan pula berimplikasi terhadap kehidupannya. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Hal ini sejalan dengan survei yang memperlihatkan bahwa faktor agama menjadi dasar pertimbangan responden.

Hal ini lah yang memunculkan terbentuknya partai politik yang mempelopori beragam ideologi yang mendasari dibentuknya partai politik seperti nasionalis .keagamaan, dan komunis, dan seiring berjalan waktu hingga berjalan nya waktu ideologi tersebut masih dipakai menjadi landasan kecuali komunis.

²RR Emilia Yustiningrum Dan Wawan Ichwanuddin, “Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12 No 1, Juni 2015, 117-135, hlm. 125.

Partai yang dikenal sebagai nasionalis adalah parpol yang yang beranggotakan lapisan-lapisan dalam masyarakat dan kalangan kelompok agama tertentu seperti petani , buruh, dan pengusaha. Sedangkan partai politik yang berdasarkan keagamaan adalah parpol yang anggotanya berasal dari pemeluk agama seperti islam, khatolik, dan Hindu.

Dalam kajian ini disebut lebih mendalam membicarakan partai islam, dimana partai islam itu sendiri terbagi atas dua kelompok. Pertama, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. Kedua, partai yang mementingkan pembangunan nilai-nilai islam dari pada simbol-simbol Islam itu sendiri. Karakter partai Islam memiliki nilai lebih oleh sekumpulan masyarakat yang mengutamakan ajaran agama dibandingkan partai nasionalios lainnya. Karena jika sudah bergabung dengan partai, Islam itu sendiri diyakini mampu menjadikan partai sebagai sarana membantu ummat.³

Padangsidimpuan adalah salah satu Kota yang menjadikan politik sebagai instansi yang berkembang pesat, hal ini dapat terlihat dari cara masyarakat menjalankan demokrasi tersebut, dalam sejarah pemilihan umum masyarakat kota padanngsidimpuan sangat terlihat antusias datang ke lokasi untuk melakukan pencoblosan baik pada pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatifnya. Pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota padangsidimpuan yang jumlah penduduknya yang beragama Islam berjumlah 176,743 jiwa (83%) dan beragama kristen

³ Isnaini Nurul Fajri, *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam* (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung), Skripsi, hlm.4.

protestan berjumlah 17,123 jiwa, katolik berjumlah 878 jiwa. Ada 12 partai yang ikut jadi peserta pemilu atau total seluruhnya sekitar 17%⁴. Diantaranya ada partai nasional yang masuk sebagai peserta, yaitu PDIP, GOLKAR, HANURA, PAN, DEMOKRAT, NASDEM dan GERINDRA, PKB, PKPI sedangkan partai islam yang ikut sebagai peserta pemilu yaitu partai PPP, PBB, PKS⁵.

Agama berfungsi bagi individu dan kelompok yaitu untuk memenuhi kebutuhan batiniah serta pemeliharaan masyarakat artinya bahwa dalam mengatur kehidupan seseorang agama memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengikat masyarakat untuk mau mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan kemaslahatan. Hubungan antara agama dan sikap seseorang menjadi hal yang penting untuk dikaji, agama disebut sebagai pengatur hubungan antara manusia dan juga terhadap tuhan. Penelaahan terhadap keyakinan keagamaan seseorang mesti harus dilakukan karena pemahaman tersebut beragam dan bermacam-macam. Menurut Abdullah sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, agama merupakan landasan terbentuknya suatu masyarakat yang kognitif yaitu agama adalah suatu awal dari terbentuknya sebuah komunitas yang memiliki kebenaran dan kehidupan yang hakiki.⁶

Dalam hal ini fungsi agama bagi sikap dalam berpolitik sangatlah penting karena disadari atau tidak agama merupakan kekuatan aktif dalam

⁴ Novita Sari, *Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu 2014*, IAIN Padangsidempuan, hlm. 1.

⁵ KPU Kota Padangsidempuan Berdasarkan data penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

⁶ Imam Suprayogo Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 16.

menjaga keutuhan hidup ummat manusia yang utama dari penyelewengan serta tidak konsistennya dalam menjalankan syariat agama tersebut dalam berpolitik ,politisi itu memang mutlak harus mempunyai latar belakang agama karena agama dapat mengontrol kegelisahsn, memantapkan kepercayaan serta sikap pribadi sendiri dengan keadaan manusia untuk siap menghadapi realitas.⁷

Atas dasar pemikiran di atas maka saya akan mencoba membuktikan kebenaran pendapat tersebut dengan megumpulkan data-data dilapangan pengumpulan data dari Lermbaga yang berwenang serta buku-buku yang ada, dimana nanti hasil dari data-data tersebut akan saya jadikan sebuah penelitan kajian karya ilmiahl dengan mengangkat judul : **“Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidimpuan (Studi Pemilihan Legislatif Tahun 2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok di atas dapat disimpulkan masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut adalah :

1. Kepartai manakah kecenderungan masyarakat muslim kota Padangsidimpuan dalam meyalurkan aspirasi politiknya, apakah pada Partai Islam atau partai nasionalis pada pemilu legislatif tahun 2014?
2. Apa alasan yang diberikan masyarakat muslim kota Padangsidimpuan memilih kedua kelompok partai tersebut?

⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 121.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Kepartai manakah kecenderungan masyarakat muslim kota Padangsidempuan dalam meyalurkan aspirasi, apakah pada Partai Islam atau partai nasionalis pada pemilu legislatif tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Apa alasan yang diberikan masyarakat muslim kota Padangsidempuan memilih kedua partai tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menambah wawasan dalam menerapkan teoro-teori yang diperoleh oleh peneliti selama kuliah dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara .
2. Secara Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tentang kajian perkembangan politik islam dan partai Nasionalis di Kota Padangsidempuan, serta menjadi pijakan untuk peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan partai politik islam dan partai Nasionalis.
3. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan bagi masyarakat dalam memilih partai politik dari sisi ilmiah, sehingga dapat mengembangkan minat masyarakat dalam memilih partai politik terutama pada pemilu legislatif.

E. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut :

1. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁸
2. Dalam KBBI Kecenderungan adalah berasal dari kata cenderung yang berarti agak miring, condong, kasih, menaruh minat, suka. Dengan dimasuki oleh kata bantu ke dan an maka kecenderungan diartikan menyukai, kesediaan. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana masyarakat menyikapinya.
3. Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan nya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.⁹

⁸Novita Sari, *Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu 2014*, IAIN Padangsidempuan, hlm. 11.

⁹Titik Triwulan Tutik, Dkk, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 331.

4. Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Legislatif bertugas membuat Undang-undang.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

1. Isnaini Nurul Fajri melakukan Penelitian skripsi berjudul sikap masyarakat terhadap partai politik islam. Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.
2. Novita Sari melakukan penelitian skripsi berjudul minat masyarakat dalam memilih partai islam di Kota Padangsidempuan pada pemilu legislatif tahun 2014.
3. Erfan Situmorang melakukan penelitian skripsi berjudul kontribusi partai politik islam dalam mendukung masyarakat Samosir agar lebih maju untuk membantu pemerintahan Kabupaten Samosir.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Isnaini Nurul Fajri membahas tentang sikap masyarakat terhadap partai politik islam. Kecamatan sukarame, Kota Bandar Lampung.

¹⁰Coky Aditya Z, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara* (Jogjakarta: Saufa, 2010), hlm. 8.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang kecenderungan masyarakat muslim kota padangsidempuan studi pemilu legislatif 2014.

2. Novita Sari membahas tentang minat masyarakat dalam memilih partai islam di kota padangsidempuan pada pemilu legislatif tahun 2014, Sedangkan penelitian ini membahas tentang kecenderungan masyarakat muslim kota padangsidempuan studi pemilu legislatif 2014.
3. Erfan situmorang membahas tentang kontribusi partai politik islam dalam mendukung masyarakat samosir agar lebih maju untuk membantu pemerintahan Kabupaten Samosir, Sedangkan penelitian ini membahas tentang kecenderungan masyarakat muslim kota padangsidempuan studi pemilu legislatif 2014.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan laporan penelitian ini terdiri V Bab Pembahasan :

Bab I berisikan mengenai latar belakang masalah yang dilandasi dengan alasan- alasan yang menjadi pedoman dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi uraian secara singkat mengenai teori-teori yang menjelaskan masalah yang diteliti.

Bab III menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, profil daerah penelitian, gambaran umum Kota Padangsidempuan, jenis penelitian, sumber

data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum bagaimana kecenderungan masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan studi pemilu legislatif tahun 2014.

Bab V penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan tidak lupa disertai saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kecenderungan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Kecenderungan” berasal dari kata cenderung yang berarti agak miring, condong, kasih, menaruh minat, suka. Dengan dimasuki oleh kata bantu ke dan an maka kecenderungan diartikan menyukai, kesediaan.¹ Hal ini dapat dilihat dari cara seseorang menyikapi sesuatu. Sikap atau *attitude* merupakan konsep paling penting dalam psikologi sosial. Sarwono mengatakan bahwa sikap adalah kecenderungan dan kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu ketika menghadapi rangsangan.² Ada beberapa teori yang mengutarakan tentang sikap, antara lain :

1. Teori belajar

Teori ini menjelaskan bahwa sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sehingga seseorang memperoleh informasi fakta maupun nilai-nilai tertentu dalam teori belajar ini terdapat tiga mekanisme yaitu asosiasi, reinforcement, dan imitasi. Pada mekanisme asosiasi pembentukan sikap dipengaruhi oleh suatu yang lain baik yang menyenangkan atau tidak. Pada mekanisme reinforcement seseorang menunnukkan sikap tertentu karena dengan sikap tersebut dapat

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia Depdikbud, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 180.

² Isnaini Nurul Fajri, *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam* (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung), Skripsi, hlm. 12.

menghasilkan kesenangan. Kemudian pada mekanisme imitasi sikap seseorang dalam wacana meniru seseorang.

2. Teori Insentif

Sikap dianggap sebagai suatu proses menimbangv keuntungan dssn kerugian yang akan ditimbulkan berbagai kemungkinan kondisi, selanjutnya individu akan mengambil sikap tertentu dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

B. Pengertian Masyarakat

1. Defenisi Masyarakat oleh para sarjana, misalnya :³

- a. M.J Herskovit mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang di organisasikan dan mengukti satu cara hidup tertentu.
- b. R. Liston, seorang ahli antropologi mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- c. Hasan Shadily mendefinisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil darp pada manusia yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

2. Unsur-unsur Masyarakat

- a. Terdapat perkumpullan manusia dalam jumlah anggotanya banyak.

³ H, Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 225.

- b. Terdapat aturan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat guna menuju pada Tujuan dan kepentingan bersama.
- c. Telah hidup dan bertempat tinggal dalam waktu yang lama pada daerah tertentu. Berbagai bidang bermasyarakat, karena memiliki pengetahuan yang modern yang maju, teknologi juga sudah berkembang, serta mengenal tulisan.

3. Ciri-ciri Masyarakat

- a. Manusia yang hidup berkelompok.

Manusia yang hidup secara bersama-sama dan kemudian membentuk sebuah kelompok. Dari kelompok yang dibentuk tersebut kemudian menjadi masyarakat. Dari kelompok yang dibentuk tersebut kemudian menjadi masyarakat. Mereka mengenali satu sama lain tiap anggota masyarakat dan saling ketergantungan.⁴

- b. Yang melahirkan kebudayaan

Dalam konsepnya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak mempunyai budaya. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan budaya tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dengan adanya proses-proses penyesuaian.

- c. Mengalami perubahan

Seperti yang terjadi dalam budaya, suatu masyarakat juga akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Contohnya

⁴ Muhad Yovi, “*Pengertian Masyarakat – Ciri Masyarakat*” Http. Woocara, Blogspot. Co. Id, diakses pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 11.00 WIB.

terdapat penemuan baru yang mungkin saja dapat mengakibatkan perubahan kepada suatu masyarakat itu sendiri.

4. Faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat

Adapun faktor yang menentukan sikap masyarakat adalah Komunikator, Efektivitas Komunikasi, dan Target Komunikasi. Komunikator merupakan hal-hal yang meliputi kredibilitas dan kekuatan komunikator. Efektivitas Komunikasi meliputi organisasi komunikasi dan isi komunikasi. Sedangkan Target Komunikasi adalah audiens itu sendiri.⁵ Dalam hal sikap untuk memilih ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, antara lain: ⁶

a. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan terhadap politik seseorang sangatlah penting, hal ini dapat mempengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentu orang akan lebih mudah memahami politik dari luar dan dalamnya.

b. Pekerjaan masyarakat

Tingkat pengetahuan dan pekerjaan masyarakat merupakan faktor internal atau faktor yang diperoleh dari dalam masyarakat. Dari pekerjaan seseorang dapat lebih peduli terhadap politik atau mungkin sebaliknya.

c. Tingkat pendidikan

⁵ Isnaini Nurul Fajri, *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Islam*, (UIN Raden Intan: Lampung), Skripsi, hlm. 19.

⁶ Andriyus, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Singing Ihilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (UIN Sultan Syarif Kasim: Riau), Jurnal, hlm.10.

Pendidikan juga termasuk dalam faktor internal, hal ini sangat menantang terhadap kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga memahami politik itu sendiri

d. Peran Aparat Pemerintahan

Yang satu ini masuk kedalam faktor eksternal, pemerintah adalah wadah yang memberikan edukasi pada masyarakat yang terkait dengan politik dan akses terhadap pengetahuan tersebut. Penyelenggara pemilu yakni KPU harus dapat mengakomodasikan para pemilih termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.

e. Pengaruh Intelektual

Era reformasi ini sangatlah mudah terasa berbagai ide, pikiran dan orientasi. Banyaknya diantara kaum intelektual dibidang politik yang mengajukan pendapat terhadap disuatu bidang politik diberbagai media, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik.

f. Konflik Antara Para Pemimpin dan Politik

Sudah umum diketahui dengan banyaknya partai politik di Indonesia dan berbedanya tujuan serta metode mereka dalam mencapai tujuannya, akan banyak terjadi konflik politik, dimana para pemimpin politik berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat sebesar-besarnya. Kader mereka nantinya akan merekrut sebanyaknya warga negara untuk memberikan dukungan kepada calon tersebut.

g. Perilaku Calon

Dalam hal ini yang sering jelas terlihat bahwa masyarakat sangat berpedoman penting terhadap kepribadian calon terutama dalam hal mementingkan kepentingan umum serta diyakini dapat mengayomi masyarakat nya.

5. Fungsi Sikap Terhadap Masyarakat

Sikap yang dimiliki seseorang mengandung fungsi yang bermacam-macam, yaitu fungsi Instrumental, pertahanan ego, ekspresi nilai dan pengetahuan. Fungsi Instrumental yaitu sampai sejauhmana sikap dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan individu, fungsi ini juga bisa disebut sebagai fungsi sarana tujuan atau fungsi penyesuaian.⁷

Fungsi pertahanan ego yaitu sikap yang diambil seseorang untuk mempertahankan ego atau kelakuannya bila merasa terancam.

Fungsi ekspresi nilai yaitu sikap seseorang yang ada di dalam dirinya sehingga untuk mengetahui sejauhmana nilai yang dimiliki pada individu dapat dilihat dari sikapnya terhadap suatu objek.

Fungsi pengetahuan yaitu sikap yang ditunjukkan seseorang menunjukkan kadar pengetahuan yang dimilikinya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap yang dimiliki seseorang memiliki fungsi yang bermacam-macam sesuai dengan kepentingan individu.

⁷ *Ibid*, hlm. 21.

C. Partai Politik Islam dan Partai Politik Nasional

1. Pengertian Partai Politik

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tentang partai politik. Miriam Budiardjo mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁸

a. Undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud adalah :

- 1) Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
- 2) Anggaran dasar partai politik yang disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik.
- 3) Anggaran Rumah Tangga partai politik selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabara AD

⁸ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 104.

- 4) Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.
- 6) Menteri adalah menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
- 7) Departemen adalah yang membidangi urusan hukum dan hak asai manusia.

b. Tujuan Umum dan Fungsi Partai Politik.⁹

- a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI.

c. Tujuan Khusus Partai Politik Adalah

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.

⁹ Novita Sari, *Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam Di Kota Padang* sidimpunan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, (IAIN : Padangsidimpunan, 2018), skripsi, hlm. 21.

- 2) Memperjuangkan cita- cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Tujuan Partai Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 dan 2 UU PARPOL NO 2 Tahun 2008 diwujudkan Secara Konstitusional.

- 1) Partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam bermsyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatua dna kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Penyerap penghimpunan dan penyalir aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan menetapkan kebijakan negara Indonesia: dan
- 4) Rekuirtmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁰

2. Partai Politik Berasaskan Islam

Partai Islam adalah mereka yang memperjuangkan nilai-nilai islam kedalam perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan negara. Tujuan dari partai islam itu sendiri adalah menegakkan kedaulatan Tuhan

¹⁰ Fokus Media, *Undang-Undang Politik* (Penghegar Bandung, 2009), hal. 167.

dimuka bumi dan menjadikan islam sebagai jalan hidup di dunia, karena islam adalah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada ummatnya sebagai pedoman bagi kebahagiaan hidup didunia maupun di akhirat.¹¹ Pemilu 1999 adalah kesempatan emas bagi komunitas Islam Politik di Indonesia. Pada tahun ini merupakan pemilu kedua setelah pemilu tahun 1912 yang mana siapapun tidak dapat membungkiri bahwa inilah momentum yang amat berharga bagi setiap kekuatan politik di tanah air untuk memulihkan harga diri politiknya termasuk dalam konteks partai politik Islam. Pada rentang 1998-1999 banyak partai politik yang muncul kepermukaan diantaranya PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PKB (Partai Kesatuan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional), PK yang pada tahun 2004 berubah menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PBB (Partai Bulan Bintang). Namun seiring berjalannya waktu hanya ada beberapa yang tersisa dikatakan sebagai partai Islam yaitu : PPP, PKS dan PKB. Ketiga partai tersebut dapat dikatakan sebagai partai Islami dilihat dari visi-misi partai itu sendiri, sementara PKB dan PAN dianggap lebih mendominasi konteks negara Indonesia yang plural. Adapun salah satu contoh partai yang berlandaskan keagamaan adalah partai PPP dengan penjabaran sebagai berikut :

Visi-misi Partai PPP :¹²

¹¹ Thoyib dan Sugiyanti, *Islam dan Pranata Sosial Masyarakat*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),hal.23.

¹² *Hhttp //AdArt dan visi-misi partai PPP serta perkembangannya.co.id*, diambil pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib.

Visi : “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmud, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.”

Misi : PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, mengembangkan ukhuwah Islamiyah yang dengan demikian dapat mencegah berkembangnya paham-paham atheis, komunis dan leninisme serta sekularisme dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperlihatkan nilai-nilai agama dengan mengembangkan nilai ukhuwah basyariyah.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan dan memelihara rasa aman, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mengembangkan ukhuwah wathaniyah.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

3. Partai Politik Nasional

Partai yang dikenal sebagai nasionalis adalah parpol yang beranggotakan lapisan-lapisan dalam masyarakat dan kalangan kelompok agama tertentu seperti petani, buruh, dan pengusaha. Adapun salah satu contoh yang bersifat Nasional adalah PDIP, partai ini adalah salah satu partai terkuat di ajang perpolitikan dari dulu sampai sekarang. Adapun penjabaran nya sebagai berikut :

Visi PDIP adalah:¹³

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan

¹³ <http://AdArt> dan visi-misi partai PDIP serta perkembangannya.co.id, diambil pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 09.20 Wib

- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

MISI PDIP :

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a. mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;

- b. membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian dapat kita lihat perbedaan yang sangat efisien terhadap kedua golongan partai politik tersebut, dimana partai politik masih menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, ukhuwah Islamiyah serta paham-paham athesis komunis dan sekularisme yang dangkal terhadap agama di Indonesia, sedangkan partai nasional menjunjung tinggi nilai kesatuan dan mempertahankan dasar negara untuk membentuk masyarakat yang maju tanpa melihat unsur keagamaan nya.

D. Pemilu Menurut Para Ahli

1. A.S.S Tambunan

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut Oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

2. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Mereka mengatakan bahwa pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu

pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatannya.¹⁴

1. Bentuk-bentuk Pemilu

a. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilaksanakan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah pilihan mereka. Bersitem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy, disurat suara tersebut termuat nama. Gambar dan nomor urut dari calon peserta pemilu. Panitia akan memberikan arahan langsung terhadap masyarakat tentang tata cara urutan proses pemilu.

b. Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.¹⁵

¹⁴ Dr, Titik Triwulan Tutik, Dkk, *Loc. Cit.* Hal. 331.

¹⁵ Dedi Rainer, “ *Pengertian Pemilu- Tujuan-Fungsi Asas Bentuk Sistem* ”<http://Spengetahuan.Com>, Diakses 24 Mei 2019 Pukul 13.30 WIB.

2. Asas penyelenggaraan pemilu pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu berepedoman kepada asas:

- a. Mandiri, Jujur
- b. Adil
- c. Kepastian Hukum
- d. Tertib penyelenggaraan pemilu
- e. Kepentingan umum
- f. Keterbukaan
- g. Proporsionalitas
- h. Akuntabilitas, Efisien dan Efektivitas

Pedoman demokrasi dalam islam adalah musyawarah (syura) yang merupakan kata keturunan (deveriasi) dari kata kerja “syawara” yang berarti meminta pendapat dan mencari kebenaran. Sedangkan secara terminologis syura bermakna memunculkan pendapat-pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk sampai pada kesimpulan yang paling tepat . Dengan demikian demokrasi yang bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersamaan rakyat dalam tataran idealnya sejalan dengan prinsip syura dalam islam.¹⁶

Di dalam Islam bermusyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal yang di syariatkan, dalam Al- qur'an surat as-syura ayat 38 Allah mengatakan :

¹⁶ Muhammad Tahir Azhaty, *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Imp;Ementasi Pada Periode Negara Madina Dan Masa Kini* (Jakarta : Kenvana 2007), hlm. 11.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.¹⁷

Dengan demikian, pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga, proses penciptaan nya yang seragam itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu manusia memiliki kedudukan yang sama.

E. Pengertian Legislatif

Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Legislatif bertugas membuat Undang-Undang.¹⁸

a. Konsep Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, terhusus dalam ketentuan umumnya yang secara tegas merumuskan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Dan dalam pasal 6 ayai 1 dan 2 dalam Undang-

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bangsa Segara, 2013), hlm. 261.

¹⁸ Coky Aditya Z, *Loc. Cit*, hml.8.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (4) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*.

Undang no 22 tahun 1999 disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan bahan untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan.

b. Kedudukan dan Fungsi DPRD

Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintahan daerah dalam membentuk suatu peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi: pertama legislasi yang diwujudkan, kedua anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan oleh pemerintahan.

c. Tugas dan Wewenang DPRD

Untuk melaksanakan kekuasaan legislatif, DPRD diberikan tugas, wewenang dan hak oleh UU 32/2004. Kesemuanya diatur dalam pasal 42 yaitu, pertama adalah mengenai tugas dan wewenang DPRD, dan kedua adalah pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Adapun pasal 43 menetapkan hak-hak DPRD. Tugas dan wewenang DPRD meliputi :

- Membentuk peraturan daerah yang dibals dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan tertentu
- Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri Republik Indonesia melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten Kota.
- Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- Meberikan pendapat dan pertimbangan keepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- Meminta laporan pertanggung jawaban kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan desentralisasi.
- Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.

Bagi anggota DPRD juga mempunyai hak antara lain : menggunakan rancangan peraturan daerah, menggunakan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memiih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan serta administrasi. Selain hal tersebut anggota DPRD memiliki kewajiban :

- 1) Mengamalkan Pancasila.
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan menaati segala Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- 4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ketuhanan negara kesatuan republik Indonesia.
- 5) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 6) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- 7) Mendahulukan kepentingan negara atas kepentingan pribadi.
- 8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dari daerah pemilihannya.
- 9) Menaati peraturan tata tertib DPRD, kode etik dan sumpah janji anggota DPRD.
- 10) Menjaga etika norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.²⁰

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 242-248.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2019 sampai dengan selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan, mandiri.

1. Visi-Misi KPU Kota Padangsidempuan

a. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan adalah: Terciptanya penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, khusus daerah Padangsidempuan.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Padangsidempuan.
- 2) Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden serta Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum bebas, rahasia, adil, akuntabel, edukatif dan beradab di Kota Padangsidempuan.

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien, dan efektif di Kota Padangsidempuan.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kota Padangsidempuan.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis terutama di Kota Padangsidempuan.
- 6) Meningkatkan kepercayaan publik (*trust of publik*) terhadap hasil Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Profil Daerah Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk mengambil teknik yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Bab ini menyajikan dua gambar umum, yaitu gambaran umum Kota Padang sidimpuan dan gambaran umum komisi pemilihan umum Kota Padangsidimpuan.

1) Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan

Sejarah berdiri Kota Padangsidimpuan konon sejarahnya, sekitar tahun 1700-an Kota Padangsidimpuan mulanya adalah dusun kecil yang berada dikampung bukit yang disebut “padang nadimpu” oleh para pedagang. Kampung bukit ini dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kampung bukit bermakna daratan tinggi yang ditumbuhi ilalang (sekarang masuk dalam wilayah kelurahan Wek II), persis di pusat Kota Padangsidimpuan dan berada di pinggiran sungai sangkumpal bonang.

Kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh sungai yang berujung dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 tuanku Lelo (salah seorang pimpinan pasukan padri), membangun sebuah benteng di Kota Padangsidimpuan dengan persetujuan tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan benteng Padangsidimpuan ini, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang ke arah sitamiang.

Pada tahun 1830 pemerintah belanda membentuk ditrick (tingkat kewedanaan), yaitu distrik mandailing, districk angkola dan districk teluk tapanuli dibawah kekuasaan goverment sumatras west kust yang berkedudukan di Padang. Pada tahun

1838 dibentuk residentie tapanuli yang berkedudukan di Padangsidimpuan.¹

Kota Padangsidimpuan kemudian menyerupai tanda silang. Pemerintah belanda membangun permukiman baru bagi masyarakat yang berada di sepanjang sungai batang ayumi yang membelah kota. Pembangunan permukiman baru ini berubah wajah kota dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada di jantung kota. Demikian juga sekolah, yang didirikan belanda antara lain adalah kwee school (sekolah guru) yang dipimpin oleh CH. Van physen yang dikenal sebagai penggalan ejaan bahasa indonesia. Pada masa kedudukan jepang, Kota Padang sidimpuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957.

Kota Padangsidimpuan sebagai kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirlitis oleh bupati kabupaten tapanuli selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960 membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan

¹ Baharuddin, dkk, *Peta Pendidikan Kota Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan, 2006), Hal.12.

dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidempuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun mesjid raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olah raga (sekarang sudah tutup), serta munculnya pemukiman baru dan berbagai fasilitas lainnya seperti perkantoran, seperti kampung marancar, kampung losung, ujung padang dan lain sebagainya.

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari kecamatan padangsidempuan, ditingkatkan statusnya ditingkatkan menjadi kota administratif berdasarkan peraturan pemerintah No 32 tahun 1982, yang terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan padangsidempuan selatan yang memiliki 8 kelurahan dan kecamatan padangsidempuan utara yang memiliki 12 kelurahan. Secara geografis wilayah Kota Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan pandangan serta pariwisata, Kota Padang sidempuan memiliki proyek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial* (ke ruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun

penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administratif Padangsidempuan ditingkatkan status menjadi Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah kota Padangsidempuan berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Padangsidempuan Utara, (2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan. (3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, (4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan (5) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.²

Letak Geografis Kota Padangsidempuan terletak pada garis 1°28' 19" s.d 01° 18'07" Lintang Utara dan 99°20' 53" s.d 99° 20'35" Bujur Timur. Lokasi wilayah Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Timur), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur.

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 11.456,66 ha. Dengan luas daratan 11,86 km² yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana

² *Ibid, hal.15.*

Kabupaten/kota lainya. Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,70% dari seluruh wilayah Kota Padangsidempuan. Pada Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan diproduktif.

Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan. Kota Padangsidempuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara di punggung pengunungan Bukit Barisan di lembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata – rata antara 23⁰C dengan kelembaban rata- rata 78%-90%.

Demokrafis dan Sosiologis Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 berdasarkan pencacatan P4B sebesar 168.536 jiwa dari 5 kecamatan dan 79 desa dan kelurahan, dengan rumah tangga sebesar 4,65 dengan kepadatan sekitar 1.470/km².

Penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 84.776 jiwa atau sebesar 50,70%

dibandingkan penduduk laki-laki yang berkisar 83.776 jiwa atau sebesar 49,70%.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Desa atau Kelurahan adalah untuk daerah Urban/kota sebesar 102.373 jiwa atau 50,76% dan penduduk pedesaan/rural adalah sebesar 66.163 jiwa atau 39,26%. Sedangkan Presentase penduduk miskin Kota Padangsidempuan 14,02%. Secara keseluruhan Kota Padangsidempuan mempunyai 58 desa dan 20 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan menurut agama yang dihitung berdasarkan persentase yaitu agama islam sebesar 90,21%, agama katolik sebesar 0,67%, agama kristen lainnya sebesar 0,01%. Selanjutnya dari segi lembaga legislatif Anggota DPR Kota Padangsidempuan hasil pemilu tahun 2004 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 4 fraksi, masing-masing adalah fraksi Partai Golkar, Fraksi partai persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Golkar.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidempuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandailing. Karenanya tidak diherankan bila hampir semua penduduk di daerah ini mampu berbahasa Mandailing termasuk komunitas dari etnis lainya.³

³ *Ibid, hal.20.*

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat penjelasan (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca.⁴

Berdasarkan pendekatan analisis kerja, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berorientasi pada penemuan-penemuan yang dimati dan diolah dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan metode pengumpulan data, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada masa sekarang ini.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi berdasarkan wawancara. Untuk penelitian ini data primer bersumber dari komisi pemilihan umum (KPU) Kota Padangsidimpuan mengenai minat masyarakat dalam memilih partai politik Islam dan Nasiponal pada pemilu legislatif tahun 2014.

Sedangkan hasil data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur yang terdiri dari :

⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Kearifan Ragam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.93.

1. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang diperoleh dari undang-undang yaitu :
 - Undang- undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008 ketentuan Umum.
 - Undang - undang N0 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum
 - Undang - undang N0 17 Tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari karangan para ahli hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer yang **terdiri dari buku Hanafie Caangra, komunikasi politik, jakarta : Pt Raja Grafindo 2009. Deliar Noer, Fokus media, Undang-Undang politik, panghegar Bandung : 2009. Deliar Noer, mengapa partai Islam kala, jakarta selatan : Alvabet 1999. Rapung Samuddin Fiqih Demokrasi, menguak kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik, Jakarta : Gozian Press, 2013.**

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam metode penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode menggunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan haruslah merupakan data yang dan akurat.⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ditempuh dengan proses sebagai berikut :

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai data mengenai hal-hal berupa catatan, data tentang pemilu legislatif 2014 dan lain sebagainya.⁶

2. Studi Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun, wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data yang ditunjukkan kepada informan terpilih. Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian merupakan informan terpilih karena seorang informan haruslah memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara :

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal.176.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal. 120-121.

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusutan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pernyataan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Pemilih dan Data Penduduk

1. Data Jumlah Penduduk Menurut Usia Dan Jenis Kelamin Di Kota Padangsidempuan.

Tabel I

Usia	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.261	11.263	22.524
5-9	11.258	10.700	21.958
10-14	11.093	10.811	21.904
15-19	11.691	12.498	24.189
20-24	9.08	11.238	21.046
25-29	7.858	7.977	15.835
30-34	7.122	6.945	14.354
35-30	6.464	6.881	13.409
40-44	6.182	6.164	13.063
45-49	5.892	5.305	12.056
50-54	5.021	3.870	10.326
55-59	3.608	3.591	8.478
60-64	2.161	2.732	3.031
65-69	1.299	1.299	1.732
70-74	824	824	1.176
75+	624	642	1.229
Jumlah	100.642	105.854	206.496

Sumber : BPS Kota padangsidempuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Padangsidimpuan menurut data statistik kependudukan diketahui bahwa jumlah penduduk pada tahun 2014 seluruhnya adalah 206.496 jiwa. Apabila di klasifikasikan dari jenis kelamin maka data kependudukan yang berjenis kelamin Perempuan pada tahun 2014 berjumlah 105.854 jiwa sedangkan data kependudukan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 100.642. Data kependudukan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Padangsidimpuan lebih didominasi oleh Perempuan.

2. Data Pendidikan Penduduk

Pentingnya pendidikan dalam memacu kualitas masyarakat menjadikan pendidikan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya. Dengan adanya Pendidikan masyarakat diharapkan dapat saling membantu dalam meningkatkan kualitas terutama dalam bidang politik ekonomi. Pendidikan memupuk kita untuk menjadi individu dewasa yang mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah sangat berpacu dalam membangun sarana yang dapat dijadikan masyarakat menjadi batu loncatan dalam meningkatkan pendidikan.

Adapun sarana yang dimaksud adalah :

Tabel II

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru/Dosen	Jumlah Siswa/Mahasiswa
Sekolah Dasar	94	4.896	26.464
SMP Sederajat	24	974	11.163
SMA Sederajat	34	1.400	15.806
Perguruan Tinggi	7	1.839	56.679
Jumlah	159	9.109	110.112

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

3. Data Keagamaan Penduduk

Faktor agama juga dianggap sangat penting dalam menjalankan politik seseorang. di Kota Padangsidimpua masyarakatnya mayoritas beragama Islam namun tidak menjadikan masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan panatik terhadap agama yang lain. Masyarakat mampu beradaptasi dalam kehidupan baik itu ekonomi dan politiknya. Berikut penulis memaparkan data kependudukan berdasarkan agama:

Tabel III

No	Agama	Jumlah	Persen
1	Islam	176.743	85,57%
2	Kristen Katolik	1.839	13,11%
3	Kristen Protestan	26.845	0,88%
4	Budha	909	0,43%
5	Konghucu	100	0,01%
	Jumlah	206.496	100%

Sumber: Data Kependudukan di Kantor Walikota Padangsidimpuan Tahun 2014.

B. Data Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Legislatif di Kota Padangsidempuan

Berikut tabel data pemilih legislatif tahun 2014 berdasarkan kecamatan:

Tabel IV

No	Uraian dan Rician perolehen suara								
1	Data Pemilih		PSP Utara	PSP Tenggara	PSP Selatan	PSP Hutaimbaru	PSP Batunadua	PSP Angkola	Jumlah Akhir
	Jumlah pemilih yang terdaftar di DPT	LK	20.177	19.594	22.136	5.579	21.944	2.850	68,141
		PR	22.136	11.903	23.770	5.924	6.979	2.943	73.655
		Jml	42.313	22.497	45.174	11.503	13.977	5.973	141.797
	Jumlah pemilih sebagai DPTB	Lk	43	2	85	10	8	0	148
		Pr	45	1	49	2	10	0	153
		Jml	88	3	180	12	18	0	301
	Pemilih terdaftar dalam DPK	Lk	646	273	905	128	168	20	2.140
		Pr	672	235	920	181	275	19	2.302
		Jml	1.318	508	1.825	309	443	39	4.442
	Pemilih terdaftar DPKTb pengguna KTP, KK dan sejenisnya	Lk	556	155	743	55	123	28	1.660
		Pr	687	152	975	90	195	42	2.241
		Jml	1.234	407	1.718	145	318	70	3.901
	Jumlah pemilih	Lk	21.442	11.024	23.677	5.722	7.297	2.898	72.090
		Pr	23.540	12.391	25.760	6.197	7.459	3.004	78.351
		Jml	44.962	23.415	49.437	11.969	14.756	5.902	150.441

Sumber : KPU Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 141.797 jiwa. Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) seluruhnya 4.442 jiwa. Daftar Pemilih Khusus Tambahan seluruhnya adalah 3.019 jiwa. Jadi total keseluruhan nya daah 150. 441 jiwa.

C. Data Hasil Pemilu Legislatif

1. Data Alokasi Kursi Jumlah Penduduk / BPPD

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Alokasi kursi Jml pdd/BPPD	Keterangan
1	Padangsidimpuan Utara	68.395	8.95	
2	Padangsidimpuan Tenggara	75.049	9.82	
3	Padangsidimpuan Selatan	25.324	3.31	
4	Padangsidimpuan Hutaimbaru	18.531	2.42	
5	Padangsidipuan Batunadua	33.783	4.42	
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	81.00	1.06	

Sumber : KPU Kota padangsidimpuan.

Dari tabel yang diatas menunjukkan keterangan yang diperoleh dari KPU bahwa didalam setiap daerah mempunyai keterangan masing-masing dalam penghitungan alokasi kursi pemilihan anggota DPRD dalam pemilu legislatif pada tahun 2014.

2. Data Perolehan Suara

Setelah melalui tahap penghitungan suara maka diperoleh hasil suara dan kursi dari masing-masing partai sebagai berikut:

Tabel VIII

Hasil perolehan suara kursi Patai Politik pada Pemilu legislatif tahun 2014.

No	Partai	Perolehan suara	Perolehan kursi	Persentase
1	Nasdem	4.434	1	3,3%
2	PKB	12.547	3	9,9%
3	PKS	3.777	0	1 %
4	PDIP	18.106	5	16,5 %
5	GOLKAR	11.765	3	9,9 %
6	GERINDRA	9.505	3	9,9 %
7	DEMOKRAT	6.397	3	9,9 %
8	PAN	7.786	3	9,9 %
9	PPP	4.589	1	3,3 %
10	HANURA	15.347	5	16,5%
11	PBB	10.347	2	6.6 %
12	PKPI	3.224	1	3.3 %
Jumlah total suara sah		107.824	30	100 %

Tabel IX

Data hasil perolehan suara Partai Politik Islam di setiap Kecamatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Nama Partai	Rincian Perolehan Suara						
PKB	PSP Utara	PSP Tenggara	PSP Selatan	PSP Hutaim baru	PSP Batunadua	PSP Angkola Julu	Jumlah Akhir
	1.529	1.051	1.661	789	917	240	6.196

Nama Partai	Rincian Perolehan Suara						
PPP	PSP Utara	PSP Tenggara	PSP Selatan	PSP Hutaim baru	PSP Batunadua	PSP Angkola Julu	Jumlah Akhir
	1.612	619	1.248	638	545	110	

Nama Partai	Rincian Perolehan Suara						
PKS	PSP Utara	PSP Tenggara	PSP Selatan	PSP Hutaim baru	PSP Batunadua	PSP Angkola julu	Jumlah Akhir
	2646	1234	2123	679	603	110	4772

Nama Partai	Rincian Perolehan Suara						
PBB	PSP Utara	PSP Tenggara	PSP Selatan	PSP Hutaim baru	PSP Batunadua	PSP Angkola Julu	Jumlah AKHIR
	1032	606	681	149	159	27	2654

Sumber : KPU Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa partai politik Islam memperoleh suara yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan partai politik Nasionalis. Hasil dari tabel tersebut terlihat sangat signifikan bahwa mayoritas masyarakat yang beragama Islam di kota Padangsidimpuan tidak menjamin bahwa politik Islam tersebut bisa mendapatkan suara yang banyak atau pun kursi yang unggul. Partai PKS sendiri tak mampu mendapatkan angka untuk mengambil satu kursi, tidak ada satu pun kandidat PKS yang duduk dikursi legislatif pada periode 2014-2019.

3. Daftar Anggota Dewan Terpilih Kota Padangsidempuan Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Kota : Padangsidempuan
Provinsi : Sumatera Utara
Dapil : Padangsidempuan 1& 2

Tabel X

No	Parpol	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PDIP	1	Rudy Hermanto	1.895
2	PDIP	2	Indra Gunawan Simbolon, S.H	2.105
3	PDIP	3	Adek Rangkuti, S.E	1.879
4	PDIP	8	Ali Hotma Tua Hsb	1.826
5	GOLKAR	7	Ahmad Marzuki Lubis	870
6	GOLKAR	1	Wildan Lubis	2.150
7	PAN	1	Eri J Samudra Dlm, S.H	1.119
8	PAN	1	Iswandy Arisandy, S.E	1.184
9	NASDEM	1	Timbul Parsaulian Simanungkalit	787
10	HANURA	2	Soritaon Siregar	1.891
11	HANURA	1	Ahmad Faisal SRG, S.H	2.153
12	HANURA	3	Sopiah Harahap	2.224
13	DEMOKRAT	4	Rika Hannum Nst, S.sos	1.336
14	DEMOKRAT	2	Irpan	1.273
15	GERINDRA	6	Drs. MHD Imron Dlm	514
16	GERINDRA	8	Erwin Muda Sinaga	1.329
11	PKB	2	Zul Achir Sy Hrp	2.181
12	PKB	1	A. Mahmudin Nst	2.126
11	PBB	3	Indra Sakti Tnjung, S.T	2.704
12	PBB	2	Parsaulian Lubis	2.391

Sumber : KPU Kota Padangsidempuan

Tabel XI

Kota : Padangsidempuan

Dapil : Padangsidempuan 3

No	Parpol	No Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	PKB	1	Ahmad Yusuf Nst	2.381
2	PDIP	1	Tati Aryani Tambunan	2.564
3	GOLKAR	1	Irsan Efendi Nst	1.828
4	GERINDRA	3	Noni Paisah, S.H	1.723
5	DEMOKRAT	1	H. Khoiruddin Nst, S.E	1.095
6	PAN	1	H. Erwin Nst.MM	1.740
7	PPP	1	Hasanuddin Sipahutar	1.091
8	HANURA	1	H. Marataman sir	1.957
9	HANURA	3	Edi Juriyanto Hrp, S.E	1.339
10	PKPI	2	Imam Gozali HRP	1.231

Sumber : KPU Kota Padangsidempuan

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini membahas tentang bagaimana sikap masyarakat muslim dalam memilih partai islam dan nasional pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidempuan. Diketahui bahwa sejarah pemilu di Padangsidempuan bahwa kekuatan partai Islam selalu bertarung dengan partai Nasional. Pada pemilu tahun 2014 ada Namun ternyata 90% masyarakat yang agamanya adalah mayoritas muslim di kota Padangsidempuan tidak menjadikan Partai Islam memperoleh kedudukan yang baik didalam perpolitikan. Dilihat dari data pemilihan

legislatif tahun 2014 dalam data Komisi Pemilihan Umum setelah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2014 yang bertepatan diadakan serentak atau secara nasional.

Adapun hasil yang diperoleh adalah partai PDIP memperoleh suara tertinggi dengan jumlah pemilih 18.106 dan menduduki 5 kursi di badan Legislatif 2014. Setelah itu HANURA berada di tingkat kedua terbanyak dengan jumlah pemilih 15.437 dan memperoleh 5 kursi. PKB memperoleh 3 kursi dengan jumlah pemilih 12.547. GOLKAR memperoleh 3 kursi dengan jumlah suara 11.765. PBB memperoleh 2 kursi dengan jumlah suara 10.347. GERINDRA memperoleh 3 kursi dengan jumlah suara 9.505. PAN MEMPEROLEH 3 kursi dengan jumlah suara 7.786. DEMOKRAT memperoleh 3 kursi dengan suara sah 6.397. NASDEM memperoleh 1 kursi dengan jumlah suara 4.434. PPP mendapat suara sah 4.598 dengan 1 kursi. PKS memperoleh suara 3.777 tetapi tidak memperoleh kursi di DPRD. PKPI memperoleh 3.224 dengan 1 jumlah kursi.

Jumlah masyarakat muslim kota Padangsidempuan adalah 206.496, masyarakat kota Padangsidempuan yang bermayoritas tidak menjadikan sosialisai dengan agama yang lain terhambat. Masyarakat mampu bersosialisasi dengan baik terutama dibidang ekonomi serta politik. Hal tersebut diperoleh dari hasil kerja sama yang baik dengan Kantor KPU kota Padangsidempuan, data-data tersebut diperbandingkan secara ilmiah dan logis terhadap kejadian nyata di lapangan sehingga data

tersebut dapat dijadikan sebuah karya ilmiah yang nantinya diharapkan bisa menjadi Panduan terhadap masyarakat dan juga kalangan mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat Kota Padangsidempuan dalam hal pemilu terutama di 2014 di Kota Padangsidempuan.

2. Sikap masyarakat dalam memilih Partai pada pemilu Legislatif Tahun 2014

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Padangsidempuan serta dari buku-buku yang bersangkutan dengan skripsi ini yang disesuaikan dengan fakta dilapangan dan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa masyarakat yaitu dari kalangan Dosen, Mahasiswa, Masyarakat Biasa, Tokoh masyarakat (alim ulama), dan dari karyawan KPU Kota Padangsidempuan. Adapun hasil wawancara yang dapat diperoleh dari masyarakat Kota Padangsidempuan adalah: :

- 1) Ibu Dermina Dhalimunte dari kalangan Dosen memilih Partai PKS.
- 2) Saudara Abdul Roman Rkt dari kalangan mahasiswa memilih partai Nasional.
- 3) Saudari Wina dari kalangan mahasiswa memilih Partai Nasional.
- 4) Bapak Hamdan Nasution dari kalangan Tokoh Masyarakat memilih Partai Islam.

- 5) Bapak hanafi dari kalangan Tokoh Masyarakat memilih Partai Nasional.
- 6) Ibuk dari kalangan Staf kepegawaian KPU memilih partai Nasional.
- 7) Sedangkan Bapak Hotnan Rambe dari staf kepegawaian KPU memilih Partai Islam.
- 8) Ibuk Sarianni dari kalangan masyarakat biasa memilih Partai Nasional.
- 9) Bapak Rahmad Rudi dari kalangan masyarakat biasa memilih Partai Nasional.
- 10) Ibuk Eva Yani dari kalangan masyarakat memilih Partai Nasional.
- 11) Bapak Niswan Rangkuti dari kalangan Guru pengajar memilih partai Islam.
- 12) Bapak Suradi dari kalangan masyarakat emilih partai Nasional
- 13) Bapak Rahman Hidayat dari kalanagan masayarakat biasa memilih Partai Nasional.
- 14) Ibu Nova Ariyanti dari kalanagn Guru Pesantren Memilih Partai Islam.
- 15) Ibuk Anna Holila dari kalangan masyarakat biasa memilih Partai Nasional.

3. Alasan masyarakat memilih Partai Nasional

- 1) Bahwa Partai Islam itu sendiri sudah kehilangan jati diri Partainya, masyarakat menganggap bahwa tidak ada beda antara partai Islam ataupun Nasional, sama-sama terlihat seperti Nasional.
- 2) Adanya hubungan kekeluargaan terhadap calon dari partai Nasional tersebut sehingga emosional itu akan muncul lebih besar terhadap keluarga.
- 3) Ketertarikan terhadap program kerja yang di janjikan.
- 4) Lebih banyak dikenal masyarakat.
- 5) Banyak memberikan Dana bantuan sehingga masyarakat lebih mengutamakan uang dari pada agama.

4. Alasan masyarakat memilih Partai Islam

- 1) Tetap berpedoman pada syariat agama dalam memilih pemimpin.
- 2) Berharap Partai Islam itu mampu membangun masyarakat yang modern tetapi tetap mengutamakan agama.
- 3) Berharap bisa mewujudkan generasi muda yang berakhlakul karimah dan intelegen.
- 4) Berharap dapat mewujudkan Negara Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi rasa Ketuhanan.¹

¹Dermina Dalimunthe, Dosen Hukum Tata Negara, IAIN Padangsidempuan , wawancara pribadi jum'at 12 Oktober 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan penjelasan tentang kecenderungan masyarakat dalam pemilu Legislatif tahun 2014 dapat diambil sebagai berikut: Bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan masih memiliki sikap yang dingin terhadap partai Islam dan lebih cenderung terhadap partai Nasional. Hal itu disebabkan karena Partai Islam itu sendiri kurang diketahui masyarakat sebab terlihat sama saja dengan partai Nasioanal, selain itu banyaknya kandidat-kandidat partai yang lari atau menyimpang dari Visi-misi partai Islam itu sendiri.

Kejadian itu dijadikan alasan utama oleh masyarakat yang pada pemilu sebeleumnya memilih partai Islam, mereka mengungkapkan bahwa sudah tidak yakin lagi terhadap partai yang menjadikan Agama Islam sebagai jargon belaka, banyaknya anggota partai Islam itu sendiri yang beralih atau mendukung Partai Nasional membuat Partai Islam tersebut tidak ada peningkatan, Partai Islam itu sendiri nyatanya tidak mampu bersaing dengan Partai Nasional.

Namun meski demikian tidak semua masyarakat memilih partai Nasional, masih ada beberapa dari masyarakat yang tetap konsisten menjalankan politik sesuai syariat Islam dan berpanduan terhadap siyasa, sehingga walau tak dapat bersaing masih ada sedikit kandidat yang duduk di kursi lembaga Legislatif di kota Padangsidempuan. Jadi dapat disimpulkan

secara singkat bahwa daerah yang masyarakatnya adalah mayoritas muslim tidak bisa dijadikan jaminan bahwa partai Politik Islam bisa memperoleh suara yang banyak dibandingkan dengan partai Nasioanal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap karya ilmiah ini adalah :

1. Hendaknya untuk pemilu berikutnya Partai Islam dapat meningkatkan kualitas partai sehingga dapat menarik simpati masyarakat kembali.
2. Partai Islam juga diharapkan mampu menjaga konsistensi nya sebagai partai yang menjunjung tinggi keagamaan. Sehingga dampak buruk yang dilihat oleh masyarakat karena kandidat yang menyimpang dapat dibersihkan dari mata masyarakat.
3. Parta Islam diharapkan bisa meningkatkan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat.
4. Masyarakat muslim juga diharapkan dapat menjunjung tinggi syariat keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Azhaty, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Imp;Ementasi Pada Periode Negara Madina Dan Masa Kini*, Jakarta : Kenvana 2007
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Baharuddin, dkk. *Peta Pendidikan Kota Padangsidempuan*, Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Kearah Ragam Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bekasi: Cipta Bangsa Segara, 2013
- Fajri, Isnaini Nurul. *Sikap Masyarakat Terhadap Partai Islam*, UIN Raden Intan: Lampung
- Fokus Media, *Undang-Undang Politik Penghegar Bandung*, 2009
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- MD., Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Perindo Persada, 2015
- Sari, Novita. *Minat Masyarakat Dalam Memilih Partai Politik Islam di Kota Padangsidempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, IAIN : Padangsdimpuan, 2018
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Thoyib dan Sugiyanti. *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : INDAH GUSTARI
NIM : 15 10300005
Tempat/Tanggal Lahir : Sihitang, 23 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sihitang

Nama Orang Tua

Ayah : Omri Pandiangan
Ibu : Eva Yani Sinaga
Alamat : Sihitang

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 200508 Sihitang masuk tahun 2003 tamat tahun 2009
- SMP Negeri 8 Padangsidempuan masuk tahun 2009 tamat tahun 2012
- SMA Negeri 3 Padangsidempuan masuk tahun 2012 tamat tahun 2015
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan

C. DATA ORANG TUA/WALI

- Nama Ayah : Omri Pandiangan
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Nama Ibu : Eva Yani Sinaga
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Sihitang

PRESTASI AKADEMIK

- IPK : 3,46
- Karya Tulis Ilmiah : Kecenderungan Pemilih Muslim Kota Padangsidempuan (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014)

Padangsidempuan, November 2019
Penulis,

INDAH GUSTARI
NIM 15 103 00005

Dokumentasi

